



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Palapa No.17 (0380) 831321 Fax : 831321



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Maksud & Tujuan	2
I.3 Kedudukan, Tugas & Fungsi	3
I.4 Fasilitas Penunjang Pelaksanaan Tugas/Aset.....	6
I.5 Sumber Daya Manusia	6
I.6 Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	
2.1 Rencana Strategis Dinas Perhubungan.....	9
2.2 Penetapan Kinerja TA 2017.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Kinerja.....	21
3.2 Akuntabilitas Keuangan.....	39
3.3 Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran.....	40
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	46
Lampiran-Lampiran	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyelenggaraan Pemerintah yang baik (good governance), dapat diukur melalui kinerja aparatur yang berkualitas. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bedaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 5 (lima) UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan se NTT disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) serta Visi dan Misi Organisasi dan untuk mengetahui sejauh mana hasil akhir (Evaluasi) kinerja Dinas dengan TUPOKSI dan RENSTRA Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Adapun materi pokok pada laporan ini merupakan informasi mengenai kinerja yang harus dipertanggung jawabkan dalam pelaksanaan tugas Dinas dan 5 (lima) UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan se - NTT selama kurun waktu 1 (satu) tahun mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang meliputi: personil, pembiayaan dan peralatan.

Sasaran yang ditetapkan meliputi :

1. Terwujudnya SDM Aparatur Perhubungan yang berkualitas memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis perhubungan ;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan PD ;
3. Dokumen perencanaan bidang perhubungan yang berkualitas
4. Meningkatnya mutu dan jumlah sarana prasarana transportasi serta kualitas database bidang perhubungan;
5. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi

Dari 5 (lima) sasaran tersebut, dijabarkan dalam 2 (dua) program prioritas dan masing-masing program ada 4 (empat) kegiatan pokok. Adapun program/kegiatan tersebut, yaitu :

1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan, dengan kegiatan prioritas :

- Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan ;
- Peningkatan Koordinasi Teknis Perhubungan se Provinsi NTT ;
- Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Bidang Perhubungan ;
- Peningkatan Kapasitas Aparatur Perhubungan.

Termasuk Hasil evaluasi dan analisis kinerja kegiatan menunjukkan capaian kinerja dengan hasil baik. Untuk beberapa kinerja yang tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal, merupakan kegiatan yang dilakukan perubahan dengan Addendum, namun ditetapkan dengan suatu nilai anggaran dan nilai manfaat yang sama, serta sesuai dengan kajian Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 5 (lima) UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ se - NTT. Sehingga mempunyai evaluasi kinerja yang menunjukkan capaian dengan makna Baik dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018.

Kendala yang dihadapi berupa :

A. Internal :

1. Terbatasnya tenaga teknis di bidang transportasi dan teknis fungsional;
2. Terbatasnya anggaran yang dimiliki;
3. Keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh PPNS Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penegakan Law Enforcement (hanya sebatas pada lokasi terminal dan jembatan timbang saja ; UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ) sementara angka pelanggaran lalu lintas tertinggi terjadi di jalan.

B. Eksternal :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memahami dan mentaati peraturan berlalu lintas.

2. Tingginya tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur jalan yang memadai, telah menimbulkan banyak titik lokasi rawan macet
3. Peningkatan pertumbuhan angkutan baik LLASDP, LLAJ, Perhubungan Laut dan Udara sehingga dapat meningkatkan pelayanan jasa kepada masyarakat melalui multi moda angkutan.

Adapun upaya penanganan masalah meliputi :

1. Dengan meningkatkan kemampuan keahlian personil, melalui pengiriman personil untuk mengikuti diklat teknis yang diselenggarakan oleh Bandiklat Perhubungan setiap tahunnya.
2. Memaksimalkan anggaran yang ada (APBD) dan mengusulkan anggaran kepada APBD Provinsi dan APBN, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan rutin sesuai dengan arahan Renstra dan RPJMD Provinsi NTT. Upaya lainnya adalah dengan melibatkan pihak ketiga (swasta) dalam kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
3. Melaksanakan sosialisasi ketertiban berlalu lintas secara rutin.
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait secara rutin melalui forum lalulintas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dilakukan berbagai kebijakan perubahan peraturan perundang-undangan termasuk reformasi birokrasi, perubahan paradigma perencanaan pembangunan dan penganggaran yang lebih transparan dengan pelibatan seluruh pemangku kepentingan dan komponen masyarakat (*bottom up*). Tuntutan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dibutuhkan suatu sistem dan mekanisme pertanggungjawaban yang terukur, jelas mudah dipahami dan batasan waktu bagi setiap instansi pemerintah.

Sejalan dengan itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk menyusun Pelaporan Kinerja dan Laporan Keuangan secara triwulanan dan tahunan.

Laporan Kinerja Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi NTT berdasarkan perencanaan dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan baik kinerja program (hasil), kinerja kegiatan (keluaran), Indikator Kinerja Sasaran (RPJMD & Renstra) dan Indikator Kinerja Utama. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat berguna sebagai alat kontrol bagi setiap unit kerja dalam perumusan kebijakan, program dan kegiatan serta penganggaran yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan serta bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kiranya dengan adanya laporan kinerja ini dapat memberikan dampak bagi setiap aparatur pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk meningkatkan kualitas hasil

kerja dan etos kerja bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya pembangunan sektor transportasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah sebagai berikut:

1. Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan 5 (lima) UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan baik menyangkut kinerja program (hasil), kinerja kegiatan (keluaran), dan indikator kinerja sasaran (RPJMD dan Renstra) serta Indikator Kinerja Utama yang ada termasuk Laporan Keuangan dalam Tahun Anggaran 2019.

2. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan 5 (lima) UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan tujuannya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Capaian Kinerja antara yang direncanakan/ditetapkan dengan yang terlaksana atau yang direalisasikan /yang dikerjakan, baik kinerja program (hasil), kinerja kegiatan (keluaran) maupun indikator kinerja lainnya yang termuat dalam RPJMD, Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- b. Mengetahui permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan penganggaran serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk pemecahannya untuk perbaikan dan penyempurnaan kinerja pelaksanaan tugas pada masa yang akan datang.

C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NTT

1. Tugas Pokok

Berdasarkan amanat Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Pergub Nusa Tenggara Timur No. 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa Dinas Perhubungan mempunyai tugas : “ ***Membantu Gubernur Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan Yang di Tugaskan Kepada Daerah***’.

2. Fungsi

Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah ;

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan ;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan ;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan (darat, laut dan udara) ;
- 4) Pembinaan unit pelaksana teknis ;
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga ;
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

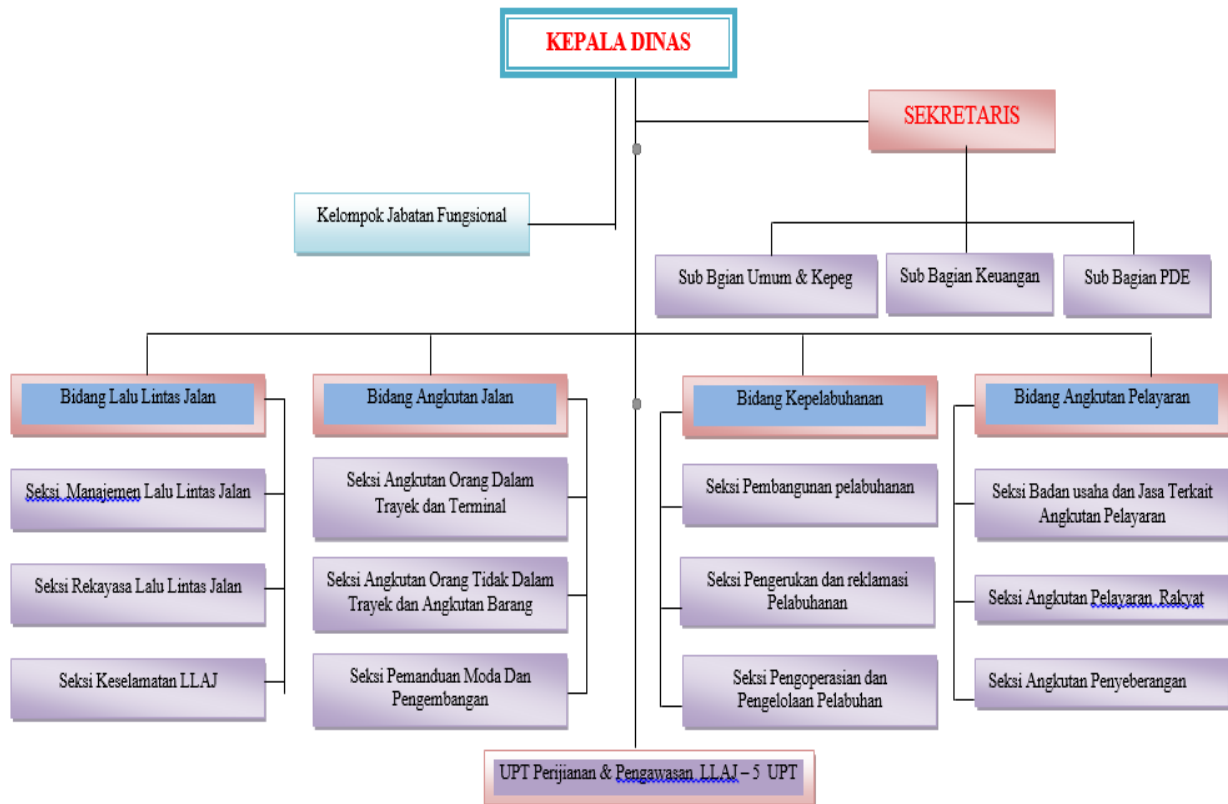
3. Struktur Organisasi

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan jalannya roda organisasi dibutuhkan struktur dan sumber daya manusia sebuah organisasi dalam system formal hubungan kerja yang membagi dan mengkoordinasi tugas – tugas sejumlah orang untuk bekerjasama dalam mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi NTT terdiri dari: Kepala Dinas; Sekretaris; Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan; Kepala Bidang Angkutan Jalan; Kepala Bidang Kepelabuhan; Kepala Bidang Angkutan Pelayaran; dan Ada 5 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan.

Adapun 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Dinas Perhubungan Provinsi NTT yaitu:

1. UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua, Alor
2. UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Belu, TTS, TTU, dan Malaka
3. UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Lembata, Sikka, Flotim, Ende dan Nangekeo
4. UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Manggarai, Manggarai Timur, Ngada dan Manggarai Barat
5. UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur



Total jabatan struktural yang ada pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT (Kantor Dinas & 5 UPT) sebanyak 41 (empat puluh satu) jabatan struktural dengan rincian eselon sebagai berikut:

- ❖ Eselon II : 1 orang
- ❖ Eselon III : 10 orang
- ❖ Eselon IV : 28 orang

Untuk mendukung dan menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perhubungan Provinsi NTT memiliki jumlah staf sebanyak 136 orang termasuk tenaga fungsional 2 orang. Jadi total keseluruhan pegawai Dinas Perhubungan Provinsi NTT sampai 31 Desember 2019 yaitu 136 orang, yang terdiri dari : pejabat struktural 38 orang, fungsional 2 orang (fungsional arsiparis) dan staf : 96 orang.

D. Fasilitas Penunjang Pelaksanaan Tugas/Aset

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas didukung dengan sarana dan prasarana gedung kantor, peralatan/mesin dan fasilitas kendaraan operasional. Sesuai data yang ada kendaraan Roda 2 sebanyak 6 unit, roda 4 sebanyak 5 unit. Selain itu Dinas Perhubungan Provinsi NTT saat ini memiliki aset berupa rumah dinas (2 unit) dan tanah di beberapa lokasi seperti tanah di Lasiana, Naikoten II, Oebobo, Oeba dan Pasir Panjang, serta fasilitas perlengkapan lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi yang baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik karena umur. Prasarana tersebut sudah berusia di atas 20 tahun, seperti Kantor Dinas yang ada sekarang usianya kurang lebih 40 tahun. Pada Tahun Anggaran 2010 telah dilakukan SID pembangunan gedung kantor baru, setiap tahun telah diusulkan untuk pembangunan gedung kantor, namun karena keterbatasan dana APBD sehingga belum dibangun juga. Sedangkan untuk UPT, sampai saat ini belum memiliki Kantor dan Kendaraan Roda 4 (operasional) untuk melakukan pengawasan dengan cakupan wilayah kerja yang cukup luas. Jenis dan Nilai Aset tersebut mencapai kurang lebih sebesar Rp 73.972.661.247,25,-

Data aset tetap dan nilainya masing-masing sebagaimana digambarkan pada Gambar 2..2 berikut.

Tabel 2.2. Data Jenis dan Nilai Aset Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2019

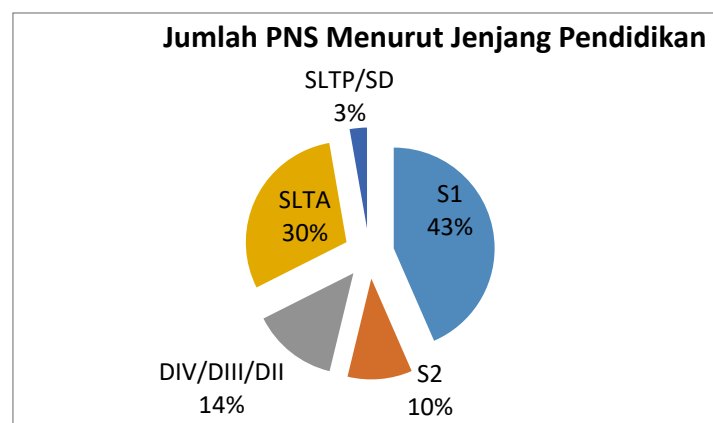
Jenis Aset Tetap	Nilai Aset (Rp.)
Tanah	40.581.383.501
Peralatan dan Mesin	2.166.717.653
Gedung dan Bangunan	25.137.385.659,25
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.459.128.934
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.628.045.500
Aset Tetap Lainnya	-
Jumlah	73.972.661.247,25

E. Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan

Sumber daya manusia (SDM) aparatur merupakan faktor penentu utama untuk melaksanakan roda organisasi yang perlu mendapat perhatian baik aspek kualifikasi maupun kuantitas dalam rangka upaya peningkatan kualitas dan kinerja organisasi demi terwujudnya

visi, misi dan tujuan organisasi. Dinas Perhubungan Provinsi NTT sebagai instansi teknis yang diberi tanggungjawab dalam sektor Perhubungan tentunya membutuhkan aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis perhubungan (darat, laut dan udara). Sesuai dengan data yang ada pegawai Dinas Perhubungan sebagian besar bukan merupakan basic perhubungan ataupun teknik sehingga ke depannya perlu ditingkatkan pengetahuan dan kemampuan teknisnya melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan kursus – kursus singkat sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna jasa transportasi yang berkualitas, selamat, aman, lancar dan terpadu. Ketersediaan tenaga teknis yang bersertifikat untuk melakukan pengawasan dan penindakan, pengujian kendaraan bermotor yang ditempatkan di UPT sama sekali tidak memadai (tenaga PPNS, Penguji Kendaraan, tenaga pengelola/operasi pelabuhan).

Jumlah PNS Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut jenjang pendidikan sebagaimana pada Gambar 2.3 berikut :



Dukungan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan 5 (lima) UPT UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Tahun Anggaran 2019 dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dishub NTT dan UPT sebesar Rp. **24.045.015.966,-** yang terdiri dari :

- ❖ Belanja Tidak Langsung Rp. 12.764.635.785,-
- ❖ Belanja Langsung Rp. 11.280.380.171,-

Terhadap dana yang bersumber dari APBN, tidak lagi dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTT sejak diberlakukannya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimana terjadi perubahan dalam mekanisme pengelolaan keuangan negara, khususnya terhadap pembiayaan yang bersumber dari APBN (Dana Pusat) pada sektor Perhubungan langsung dikelola oleh UPT Pusat / Satuan Kerja Sementara yang berada di Dishub Provinsi NTT dan bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Perhubungan RI.

Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan 5 (lima) UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan pada mekanisme pertanggungjawaban / akuntabilitas menjadi parsial dalam pengukuran kinerja karena hanya melaksanakan tugas – tugas yang dibiayai dari dana APBD, sedangkan dana yang bersumber dari APBN tidak lagi ditangani Dinas Perhubungan Provinsi NTT (dana sektoral/Kementrian Perhubungan) karena hanya menjalankan fungsi koordinasi perencanaan, program dan kegiatan.

F. SISTIMATIKA PENYAJIAN

Penyajian LKIP ini terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu:

- BAB I Pendahuluan, menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Profil dan Sistematika Penyusunan.
- BAB II Perencanaan Kinerja, menguraikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan CaraPencapaian Tujuan dan Sasaran.
- BAB III Akuntabilitas Kinerja, menguraikan Indikator Kinerja, Capaian Kinerja, Aspek Keuangan dan Permasalahan yang dijumpai Dinas Perhubungan Provinsi NTT.
- BAB IV Penutup, berisi Tinjauan Umum yang mengemukakan keberhasilan / kegagalan, permasalahan, Rekomendasi yang berkaitan dengan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi NTT.

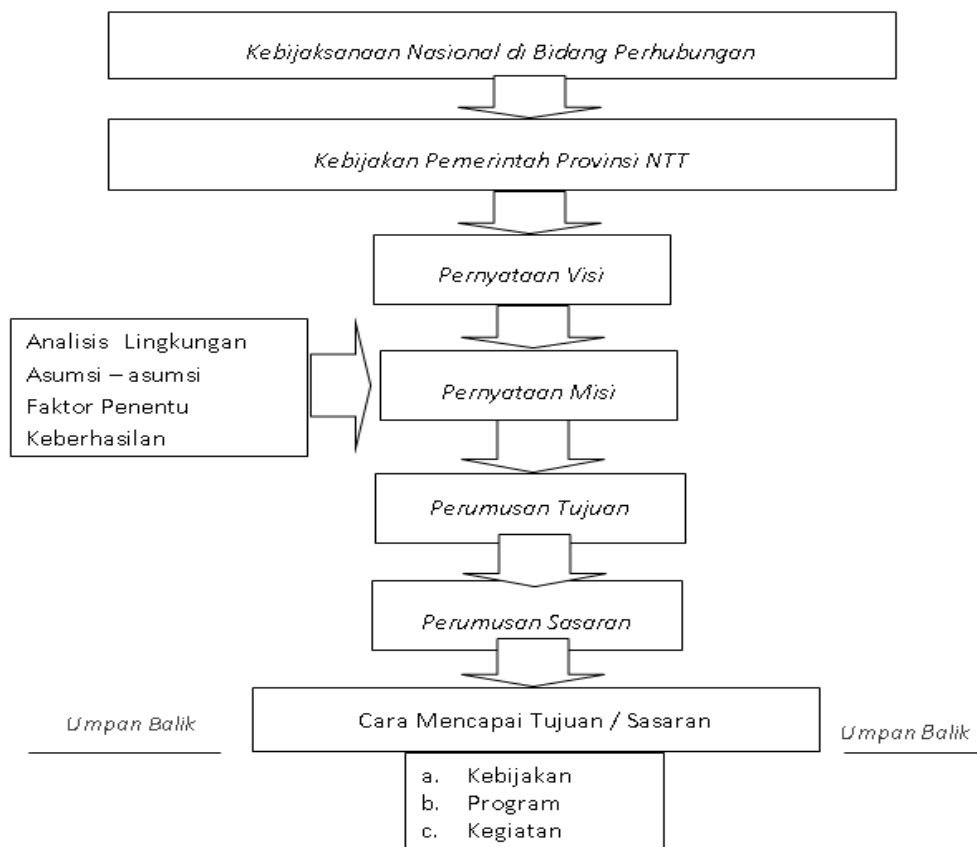
BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NTT

Perencanaan Strategik merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama – sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi (*stake holder*) untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian visi dan misi. Perumusan rencana strategik tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan – tahapan kegiatan mulai dari yang paling ideal / kualitatif sampai dengan yang paling teknis / kuantitatif. Tahapan – tahapan tersebut merupakan rangkaian yang saling terkait dalam mencapai suatu tujuan bersama terhadap visi dan misi organisasi.

Model rencana strategik yang disusun mengikuti pola sebagai berikut:



Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023 telah disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43a Tahun 2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023. Rencana strategis ini menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Sektor Perhubungan di Provinsi NTT baik program dan kegiatan pembangunan/pengembangan sarana/prasarana perhubungan yang dibiayai dana APBD Provinsi NTT maupun sumber dana APBN. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTT. Secara umum Renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTT memuat penjabaran dari visi, misi NTT, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja beserta target kinerja tahunan. Indikator Kinerja Sasaran atau Indikator Kinerja Utama Sektor Perhubungan secara rinci dan jelas dicantumkan dalam Renstra Bab VII sebagai penjabaran RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023 Bab VII. Uraian singkat Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2018 – 2023 adalah:

Visi : “ NTT BANGKIT MENUJU SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.

Misi, untuk menjabarkan dan menjalankan visi tersebut maka ditetapkanlah misi sebagai berikut :

- a) Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
- b) Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*);
- c) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
- d) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
- e) Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Sektor Perhubungan 5 (lima) tahun ke depan dijabarkan lebih lanjut dalam penetapan pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Berdasarkan misi dan faktor – faktor kunci keberhasilan, maka Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan tujuan sebagai berikut:

- a) Misi-1 : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil, dengan tujuan :
 - 1. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan.
- b) Misi-2 : Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*), dengan tujuan:
 - 1. Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi daerah.
 - 2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor perhubungan.
- c) Misi –3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan, dengan tujuan :
 - 1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas.
 - 2. Meningkatnya mutu dan jumlah sarana prasarana transportasi serta kualitas database bidang perhubungan.
 - 3. Tersedianya sarana dan prasarana transportasi publik yang memadai.
 - 4. Tersedianya peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan.
 - 5. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi.
- d) Misi – 4 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dengan tujuan :
 - 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM penyelenggara transportasi.
 - 2. Meningkatkan kinerja pelayanan Perangkat Daerah.
- e) Misi – 5 Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan tujuan :
 - 1. Mengembangkan sistem pelayanan publik yang berkualitas melalui penyusunan NSPK pelayanan publik

3. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dan menggambarkan hal yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan 5 (Lima) UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ se-NTT melalui implementasi – implementasi nyata yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran yang ada dapat memberikan arah dan langkah dalam penyusunan

kegiatan yang bersifat khusus dan terukur, akuntabel, realistik dan berlaku dalam periode tertentu.

Sasaran yang dicapai Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan 5 (lima) UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ se NTT dilakukan dalam 5 (lima) tahun untuk dapat diukur sampai sejauh mana dampak yang dibuat dalam sasaran tersebut baik dari hasil yang didapat dalam organisasi maupun manfaat nyata baik internal maupun eksternal serta dampak terhadap masyarakat sebagai muara terakhir dalam pemberian pelayanan transportasi melalui organisasi Dinas Perhubungan Provinsi NTT.

Sasaran tersebut merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik instansi pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi NTT dengan fokus utamanya adalah memberikan pendalaman dalam penentuan sasaran tersebut melalui tindakan (*action*) dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional sehingga untuk mencapai sasaran tersebut Dinas Perhubungan Provinsi NTT menyusun rencana kegiatan (Program kerja) tahunan Dinas Perhubungan Provinsi NTT yang diuraikan dalam kegiatan program administrasi perkantoran dan program belanja modal yang berorientasi pada kegiatan pembangunan baik penyediaan maupun pengadaan sarana dan prasarana perhubungan di wilayah NTT. Dalam rencana kegiatan ini termasuk didalamnya komponen – komponen pendukung baik berupa Dana, Sumber Daya Manusia, Sarana dan lain – lainnya.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran pembangunan sektor perhubungan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT sebagai berikut :

1. Terwujudnya SDM Aparatur Perhubungan yang berkualitas memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis perhubungan;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan SKPD;
3. Terwujudnya perencanaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas;
4. Meningkatnya mutu dan jumlah sarana prasarana transportasi untuk aksesibilitas dan kelancaran mobilitas orang dan/atau barang.
5. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan merupakan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi.

4. Kebijakan

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang ada, dirumuskan strategi dan kebijakan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas transportasi dengan mempedomani rencana pengembangan transportasi wilayah yang termuat dalam RTRW dan TATRAWIL Provinsi NTT. Sejalan dengan itu, guna mendukung 6 (enam) tekad dan 8 agenda Pemerintah Provinsi NTT, dirumuskan Kebijakan dan Strategi pembangunan sektor transportasi, sebagai berikut :

a. Kebijakan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan dan Kapasitas Kelembagaan, kebijakan ini diarahkan untuk : 1) meningkatkan pengetahuan dan kemampuan (teknis dan fungsional) aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, kursus, bimbingan teknis di bidang perhubungan; 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan, melalui pengembangan data dan informasi sektor perhubungan dan pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor yang memadai.

b. Kebijakan Pengembangan Sistem Transportasi Jalan

Kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan transportasi jalan yang selamat, efektif, efisien dan terpadu dalam satu kesisteman melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi jalan dan fasilitas keselamatan dan keamanan lalu lintas jalan serta peningkatan pelayanan angkutan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan.

c. Kebijakan Pengembangan Sistem Transportasi Penyeberangan

Kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan lalu lintas angkutan penyebrangan dalam membangun konektivitas antar wilayah/daerah yang efektif, efisien dan terpadu dalam satu kesisteman melalui pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana fasilitas lalu lintas angkutan

penyeberangan serta peningkatan pelayanan angkutan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan.

d. Kebijakan Pengembangan Sistem Transportasi Laut

Kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan transportasi laut dalam membangun konektivitas lokal (dalam wilayah kabupaten/kota), regional (lintas kabupaten/kota), nasional (antar provinsi) dan konektivitas internasional (antar negara) yang efektif, efisien dan terpadu dalam satu kesisteman melalui pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut serta peningkatan pelayanan angkutan laut kepada masyarakat pengguna jasa angkutan.

e. Kebijakan Pengembangan Sistem Transportasi Udara

Kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan transportasi udara dalam membangun konektivitas regional (antar kabupaten/kota, nasional (antar provinsi) dan konektivitas internasional (antar negara) yang efektif, efisien dan terpadu dalam satu kesisteman melalui pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana fasilitas transportasi udara serta peningkatan pelayanan angkutan udara kepada masyarakat pengguna jasa angkutan.

f. Kebijakan Pengembangan Sistem Transportasi Antar Moda / Multimoda

Kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan antar moda transportasi, mengembangkan keterpaduan angkutan jalan, terminal, pelabuhan (laut dan penyeberangan) dan bandar udara dalam suatu pelayanan yang terpadu dan efisien melalui penyediaan sarana angkutan umum yang berkualitas dan pengaturan rute/lintasan pelayanan.

5. Strategi

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang ada maka dirumuskan strategi / cara untuk mewujudkannya :

- a. Strategi Pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparatur dan kapasitas kelembagaan, meliputi :
 - ❖ Melakukan analisis kebutuhan SDM aparatur dan jenis pelatihan teknis, fungsional dan struktural yang dibutuhkan.
 - ❖ Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait terutama Kementerian Perhubungan terkait penyelenggaraan diklat teknis perhubungan di daerah;

- ❖ Meningkatkan ketersediaan data dan informasi sektor perhubungan serta sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor yang memadai.
- b. Strategi di bidang pengembangan sistem transportasi jalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi :
- ❖ Peningkatan aksesibilitas antar wilayah dan antar lintas batas negara.
 - ❖ Optimalisasi pelayanan penumpang dan barang antar pusat kegiatan dan peningkatan aksesibilitas dari dan ke pusat - pusat produksi serta kawasan potensial dan strategis lainnya;
 - ❖ Mengembangkan pelayanan angkutan perbatasan dan angkutan lintas batas negara;
 - ❖ Mengembangkan konsep angkutan perdesaan dan keperintisan yang menjamin akses ke seluruh wilayah perdesaan dan wilayah terisolasi terutama desa sasaran Program Desa Mandiri Anggur Merah;
- c. Peningkatan Fungsi dan Pelayanan Jalan.
- ❖ Menjadikan keselamatan jalan sebagai tujuan utama penyelenggaraan lalu lintas jalan;
 - ❖ Menyeraskan penanganan berbagai moda transportasi jalan terutama menyangkut angkutan umum dan kendaraan tak bermotor;
 - ❖ Mengoptimalkan pelayanan lalu lintas pada seluruh jaringan jalan yang ada melalui sistem informasi/petunjuk arah dan rute yang memadai;
 - ❖ Menyeraskan penataan lalu-lintas dan *traffic management* antar kabupaten/kota;
 - ❖ Merumuskan strategi penanganan simpang-simpang pada berbagai jenis simpang yang ada;
 - ❖ Memperkenalkan prinsip-prinsip pembatasan lalu lintas terutama di daerah perkotaan;
 - ❖ Memprakarsai sistem lalu-lintas yang ramah lingkungan dan hemat energi;
 - ❖ Mengendalikan lalu lintas berat dalam rangka melindungi kerusakan prasarana jalan;
 - ❖ Memperkenalkan sistem parkir di kawasan pusat kota dan pusat kegiatan yang efisien.

d. Terminal Barang dan Penumpang

- ❖ Pembangunan terminal barang dan penumpang untuk mendukung pergerakan orang dan barang serta mengintegrasikan dengan simpul transportasi lainnya;
- ❖ Meningkatkan daya tampung kendaraan di setiap terminal;
- ❖ Pengembangan fasilitas pendukung di setiap terminal;
- ❖ Meningkatkan akses ke terminal;
- ❖ Memberikan pelayanan kepada pengguna jaringan jalan agar mendapatkan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan dalam melakukan perjalanan ke/dari suatu wilayah

e. Angkutan Penumpang dan Barang

- ❖ Mengembangkan konsep angkutan umum di wilayah provinsi meliputi angkutan perkotaan, wilayah (regional) dan perdesaan dalam satu kesatuan pelayanan;
- ❖ Mengembangkan angkutan regional yang menghubungkan dan memadukan angkutan perkotaan dan perdesaan;
- ❖ Menyiapkan perumusan tentang terminal, simpul transfer, halte dan bus stop yang aman, nyaman dan mencerminkan budaya lokal;
- ❖ Menerapkan *Buy The Service* untuk angkutan umum perkotaan dan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP);
- ❖ Merencanakan sistem sirkulasi barang dalam suatu jaringan lintas dan fasilitas bongkar muat yang terpadu dengan moda transport lain serta membatasi angkutan barang berat, mengutamakan penggunaan angkutan yang sesuai dengan kemampuan prasarana jalan yang ada.

f. Strategi di bidang pengembangan sistem transportasi penyeberangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

- ❖ Menjadikan angkutan penyeberangan sebagai sarana transportasi lintas pulau kecil untuk penumpang dan barang serta mendukung keterbukaan isolasi wilayah dan mendukung kelancaran distribusi barang produksi dari tiap pulau-pulau kecil yang ada di tiap wilayah;
- ❖ Mengembangkan pelabuhan penyeberangan yang menghubungkan pulau-pulau kecil antar wilayah kabupaten/kota dan menghubungkan daerah produksi hasil bumi dengan simpul-simpul transportasi pada daerah yang lebih maju;

- ❖ Menyediakan dan meningkatkan kualitas moda angkutan kapal penyeberangan yang disesuaikan dengan daya angkut dan daya muat penumpang dan barang pada lalu lintas penyeberangan lintas pulau;
 - ❖ Membangun dermaga penyeberangan serta fasilitas pendukungnya dan mengarahkan pola pengembangan kawasan dermaga, termasuk dermaga/terminal terpadu;
 - ❖ Mengupayakan dan memantapkan keterpaduan layanan penyeberangan dengan moda lain seperti jalan dan terminal.
- g. Strategi di bidang pengembangan sistem transportasi laut di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka mewujudkan transportasi laut yang andal dan berkemampuan tinggi meliputi
- ❖ Meningkatkan peran armada pelayaran nasional, baik untuk angkutan dalam negeri maupun ekspor-impor dengan memberlakukan azas *cabotage*; Untuk itu diperlukan dukungan perbankan dalam penyediaan kredit murah bagi peremajaan armada;
 - ❖ Mengembangkan sarana dan prasarana fasilitas transportasi laut pada daerah/wilayah pelabuhan-pelabuhan yang potensial, strategis dan cepat tumbuh;
 - ❖ Mengurangi bahkan menghapus pungutan-pungutan tidak resmi di pelabuhan, sehingga tarif yang ditetapkan otoritas pelabuhan tidak jauh berbeda dengan biaya yang secara riil dikeluarkan pengguna jasa kepelabuhan, melalui peningkatan koordinasi bagi semua instansi yang terkait dalam proses bongkar muat barang;
 - ❖ Pemenuhan standar pelayaran internasional untuk peningkatan keselamatan pelayaran, baik selama pelayaran maupun saat berlabuh dan bongkar muat di pelabuhan;
 - ❖ Mengembangkan terminal peti kemas/*Dryport* yang lebih efisien, efektif serta berdaya saing guna meningkatkan arus pergerakan barang ekspor dan import dari dan ke luar wilayah Provinsi NTT;
 - ❖ Mengembangkan pelayanan angkutan keperintisan untuk membuka akses pada daerah terpencil /tertinggal yang belum dilayani usaha angkutan komersil.

- h. Strategi di bidang pengembangan sistem transportasi udara di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka mewujudkan transportasi yang andal dan berkemampuan tinggi meliputi :
- ❖ Pengembangan prasarana dan fasilitas bandar udara meliputi *runway*, *taxiway*, apron dan terminal;
 - ❖ Memperkuat simpul bandara dengan mengkombinasikan pelayanan menuju terminal terpadu meliputi : angkutan bus, dan angkutan kota serta mendukung kegiatan komersial dan pariwisata;
 - ❖ Mengembangkan fasilitas kargo, serta fasilitas pemrosesan barang guna meningkatkan nilai tambah komoditas;
 - ❖ Mengembangkan rute penerbangan langsung domestik maupun internasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menunjang potensi pariwisata, baik melalui penerbangan reguler maupun *charter*;
 - ❖ Mengembangkan pelayanan angkutan keberintisan untuk membuka akses pada daerah terpencil /tertinggal yang belum dilayani usaha angkutan komersil.
- i. Strategi di bidang Transportasi Antarmoda/Multimoda untuk mewujudkan perpaduan moda dan integrasi antar moda angkutan untuk penumpang dan mendukung distribusi barang meliputi :
- ❖ Mengembangkan konsep angkutan umum di wilayah provinsi meliputi angkutan perkotaan, wilayah (regional) dan perdesaan dalam satu kesatuan pelayanan;
 - ❖ Mengembangkan konsep angkutan perkotaan yang melayani pusat kota dan wilayah aglomerasinya yang efisien, ramah lingkungan dan terpadu;
 - ❖ Mengupayakan dan memantapkan keterpaduan moda jalan, terminal dengan dermaga penyeberangan;
 - ❖ Mengembangkan angkutan regional yang menghubungkan dan memadukan angkutan perkotaan dan perdesaan;
 - ❖ Menyiapkan perumusan tentang terminal, simpul transfer, halte dan *bus stop* yang aman dan nyaman;
 - ❖ Mengembangkan keterpaduan angkutan jalan, terminal serta dermaga penyeberangan dan udara dalam suatu pelayanan yang terpadu dan efisien.

6. Program / Kegiatan

- a) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan, dengan kegiatan pokok :
 - 1. Pengelolaan lalu lintas jalan;
 - 2. Pengelolaan angkutan jalan;
 - 3. Pengelolaan Kepelabuhanan;
 - 4. Pengelolaan angkutan pelayaran;
- b) Program NTT Sejahtera, dengan kegiatan pokok :
Pengembangan Perhubungan ke Pariwisata Estate.

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi NTT yang dianggap merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategik adalah dengan mengkaji dan menentukan terlebih dahulu apa yang akan dicapai dan kapan dicapai oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan 5 (lima) UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ se- NTT. Untuk itu diperlukan penetapan langkah – langkah yang srategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi NTT. Sejauh ini telah dilakukan penerapan komitmen dari pimpinan puncak terutama dalam menentukan kebijaksanaan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan 5 (lima) UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ se-NTT guna dapat berjalan dengan baik sesuai dengan garisan komitmen yang sudah disepakati. Jabaran dari pada Komitmen tersebut adalah Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan 5 (Lima) UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ se-NTT yang tetap mengacu pada visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya SDM Aparatur Perhubungan yang berkualitas memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis perhubungan	Persentase Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan teknis meningkat	10 %	Rp 297.360.000
		Persentase jumlah tenaga teknis bidang perhubungan meningkat	10 %	
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan SKPD	Jumlah ijin trayek/ijin operasi yang diterbitkan meningkat	1652 ijin	Rp 1.881.485.750

		Persentase peningkatan realisasi pendapatan	100%	Rp. 1.580.728.200
3.	Dokumen perencanaan bidang perhubungan yang berkualitas yang berkualitas;	Jumlah Dokumen perencanaan bidang perhubungan yang berkualitas	3 dok	Rp 2.351.017.000
4.	Meningkatnya mutu layanan dan jumlah sarana prasarana transportasi untuk aksesibilitas dan kelancaran mobilitas orang dan/atau barang;	Jumlah terminal tipe B yang baik	1 Terminal	Rp. 1.050.000.000
		Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pelabuhan laut dan penyeberangan	100%	Rp. 373.623.000
		Persentase Pengawasan sub sektor darat, laut dan udara		Rp. 459.659.200
		Penambahan jumlah trayek angkutan jalan dan penyeberangan	Jalan : 1, Penyeberangan : 1	Rp. 223.469.000
5	Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan di ruas jalan provinsi : - Guardrail di Kab. Ngada	237 M	Rp. 844.719.500
		Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan ke Pariwisata Estate : - RPPJ di Kab. Kupang	15 buah	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas – tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan Renstra. Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra. Untuk mengukur capaian kinerja yang telah ditetapkan dan diperjanjikan dalam Renstra dan Penetapan Kinerja maka dilakukan pengukuran capaian kinerja dan metode yang digunakan adalah pengukuran kinerja:

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja

Sedangkan metode Penyimpulan Capaian Sasaran dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- ❖ $X \geq 85 \%$: Sangat Berhasil
- ❖ $70 \% \leq X < 85 \%$: Berhasil
- ❖ $55 \% < X < 70 \%$: Cukup Berhasil
- ❖ $X \leq 55 \%$: Belum Berhasil

Dari 5sasaran strategis yang ada di Dinas PerhubunganProvinsiNusa Tenggara Timurtahun 2016maka hasil capaian pengukurankinerja sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN 1

**Terwujudnya SDM Aparatur Perhubungan yang Berkualitas
Memiliki Pengetahuan dan Kemampuan Teknis Perhubungan**

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan keamanan, ketertiban dan keselamatan lalu lintas jalan, pelayaran, kepelabuhanan dan perkapalan, pelayanan perijinan (ijin trayek/lintasan, ijin pembangunan kapal di bawah 7 GT dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk rubah bentuk kendaraan). Dalam melakukan kegiatan-kegiatan teknis sangat membutuhkan aparatur yang memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis di bidangnya masing-masing (bidang perhubungan darat, laut).

Program yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan dengan kegiatan – kegiatan : Pelatihan Teknis Pengelolaan Terminal, Diklat PKB dasar, Diklat PKB lanjutan 2, Diklat Penilai Andalalin, Diklat PPNS,Diklat Inspeksi Sungai dan Danau Tingkat Dasar, dengan total anggaran sebesar **Rp. 457.164.000,-**

Tabel 3.1**Sasaran Terwujudnya SDM Aparatur Perhubungan Yang Berkualitas Memiliki Pengetahuan dan Kemampuan Teknis Perhubungan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Target 2019	Capaian 2019
1	Persentase jumlah tenaga teknis bidang perhubungan meningkat	% (orang)	4 orang (100%)	7 orang (100%)	11 orang	6 orang (63,63%)
2	Persentase jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan teknis meningkat	% (orang)	0 %	19 orang 100%	15 orang	15 orang (100%)
Total						81.81%

Penjelasan dari pencapaian indikator capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase tenaga teknis bidang transportasi yang bertambah

Sesuai target Renstra jumlah tenaga teknis bidang transportasi yang memiliki sertifikat untuk melakukan tindakan penyidikan kendaraan di jalan (PPNS bidang perhubungan), tenaga ahli penguji kendaraan ditargetkan meningkat 10% pada setiap tahunnya. Kondisi tahun dasar yaitu tahun 2017, sesuai target Renstra bertambah 10% jumlah tenaga teknis, realisasi yang dikirim adalah 4 orang sesuai target yang ditetapkan tahun 2017, sehingga capaiannya adalah 100%. Pada tahun 2018 target yang ditetapkan adalah sebanyak 7 orang, dan realisasinya adalah 7 orang (diklat PKB dasar 2 orang, diklat kepemimpinan bagi perempuan, diklat pengembangan budaya organisasi, diklat SAR 2 orang, diklat pembentukan pola pikir ASN) sehingga capaiannya adalah 100%. Pada tahun 2019 target yang ditetapkan sebanyak 11 orang, namun yang dapat terealisasi hanya sebanyak 6 orang, yaitu diklat PKB dasar sebanyak 3 orang, diklat Andalalin 1 orang, diklat PPNS sebanyak 2 orang sehingga capaiannya adalah 63,63%.

2. Persentase jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan teknis meningkat

Persentase jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan teknis sesuai target Renstra dan Perjanjian Kinerja (PK) meningkat 10%. Pada tahun 2017 tidak ada diklat dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan karena adanya rasionalisasi anggaran

Kementerian Perhubungan RI, sehingga capaiannya 0% untuk tahun 2017. Pada tahun 2018 dari target yang ditetapkan sebanyak 19 orang, terealisasi semuanya sebanyak 19 orang, sehingga capaiannya adalah 100%. Pada tahun 2019 dari target 15 orang, terealisasi semuanya sebanyak 15 orang sehingga capaiannya 100%.

Dengan demikian rata-rata capaian kinerja sasaran Terwujudnya SDM Aparatur Perhubungan yang berkualitas memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis Perhubungan adalah 81.81 % atau dikategorikan berhasil.

❖ **Permasalahan :**

1. Masih kurangnya koordinasi dengan Kementerian Perhubungan (BPSDM) untuk kerjasama (MOU) dengan Pemerintah Provinsi NTT (Badan Diklat Provinsi NTT) dan Dinas Perhubungan untuk penyelenggaraan Diklat yang terpusat di Kupang melalui pembiayaan APBN atau sharing dengan APBD Provinsi NTT. Apabila dilaksanakan di Kupang semakin banyak peserta yang mengikuti Diklat tersebut dan lebih efisien.
2. Jumlah peserta diklat dari seluruh Indonesia yang tidak memenuhi kuota yang menyebabkan beberapa diklat dibatalkan.

❖ **Solusi :**

Perlu dialokasikan anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan Diklat Teknis Bidang Perhubungan dan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPSDM Kementerian Perhubungan untuk penyelenggaraan Diklat terpusat di Kupang. Untuk jangka panjang mengingat Provinsi NTT merupakan salah satu Provinsi Kepulauan secepatnya merealisasikan pembangunan Balai Diklat Pelayaran kampus NTT di Kupang asalkan Pemerintah daerah menyiapkan lahan., yang sesuai DED berlokasi di Bolok.

SASARAN 2

Meningkatnya kinerja pelayanan SKPD

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan program/kegiatan dan anggaran yang dialokasikan, apa yang direncanakan dapat terserap dan berdampak kepada masyarakat. Disamping itu, sektor perhubungan sebagai salah satu sektor penghasil PAD untuk melakukan langkah-langkah strategis peningkatan penerimaan dari sektor perhubungan, minimal mencapai target yang ditetapkan. Program yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pengawasan Bidang Perhubungan dan sub kegiatan sebagai berikut : Pembinaan teknis kepada UPT Perijinan & Pengawasan LLAJ, Pemantauan dan pengawasan hari-hari besar keagamaan dan kenegaraan, Operasi pemeriksaan kendaraan bersama instansi terkait, Pendataan subyek retribusi, Pendekatan pelayanan perizinan (izin trayek dan izin insidentil) dengan total anggaran sebesar Rp. 1.413.195.000,-

Tabel 3.2
Meningkatnya Kinerja Pelayanan SKPD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Target 2019	Capaian 2019	Renstra 2019
1	Jumlah ijin trayek/ijin operasi yang diterbitkan meningkat	ijin	933 ijin	1.643 ijin	1652 ijin	932 ijin/ 56.42%	100%
2	Persentase realisasi pendapatan meningkat	%	100%	96.78%	100%	82.05%	100%
3	Persentase realisasi belanja meningkat	%	100%	93.27%	100%	96.21%	100%
Total						78.23%	

Penjelasan dari pencapaian indikator capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Jumlah ijin trayek/ijin operasi yang diterbitkan meningkat

Jumlah ijin trayek yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 adalah sebanyak 1.652 ijin, namun jumlah yang dapat dicapai sampai dengan Desember 2019 adalah sebanyak 932 ijin trayek atau capaiannya 56.42%.

2. Persentase realisasi pendapatan meningkat

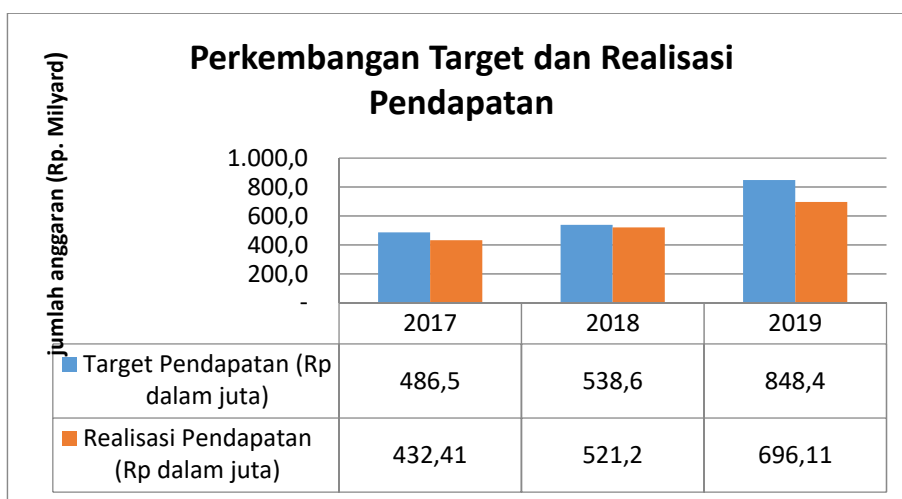
Sektor Perhubungan merupakan salah satu sektor sumber Pendapatan Asli Daerah, melalui beberapa obyek retribusi yaitu : Retribusi Jasa Umum (Pengujian Kendaraan Bermotor), Retribusi Perijinan Tertentu (Retribusi Izin Trayek AKDP), Retribusi Terminal Tipe B, sewa kios/Warung, Retribusi jasa verifikasi Andalalin. Dasar hukum pelaksanaan yaitu Perda

Provinsi NTT Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Trayek, Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Pergub Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Ijin Trayek, Retribusi Jasa Umum Dan Retribusi Jasa Usaha.

Target realisasi pendapatan Tahun 2019 adalah 100%, dengan realisasi s/d Desember 82.05%.

Perkembangan target dan realisasi pendapatan sektor perhubungan Tahun 2017 s/d 2019 sebagaimana pada Gambar 3.1 berikut ini.

Gambar 3.1 Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Sektor Perhubungan Tahun 2017 s/d 2019



Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terget PAD yang diberikan kepada Dinas Perhubungan selalu naik. Pada tahun 2017 dengan besaran target sebesar Rp. 486.475.000, realisasinya adalah sebesar Rp. 432.513.500 atau (88,91%). Pada tahun 2018 target penerimaan sebesar Rp. 538.575.000, dan realisasi yang dicapai sampai bulan Desember adalah sebesar 96.78%, pada tahun 2019, dengan target Rp. 848.400.000,- realisasinya adalah sebesar 82.05%.

4. Persentase realisasi belanja meningkat

Target realisasi belanja (belanja langsung dan tidak langsung) tahun 2019 sebesar 100%, dengan realisasi s/d Desember adalah 96.21%

Dengan demikian rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan PD adalah 78.23% atau dikategorikan berhasil.

❖ **Permasalahan :**

- 1) Khusus untuk pendapatan, realisasi s/d Desember hanya mencapai 82.05% disebabkan karena UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ yang tidak bisa melakukan uji mutu kendaraan, karena kurangnya personil di UPT, serta belum beroperasinya semua terminal type B.
- 2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas bagi 5 (lima) UPT Wilayah Kupang, Belu, Sikka, Sumba dan Manggarai. Sampai saat ini UPT belum memiliki kantor sendiri, tidak ada kendaraan roda 4 untuk operasional untuk menjangkau seluruh wilayah kerja yang ada termasuk biaya pemondokan untuk pegawai yang rata-rata rumah pribadi dan keluarganya berada di Kupang.
- 3) Untuk Belanja, realisasi belanja hanya mencapai 96.21% disebabkan ada 2 (dua) diklat yang dibatalkan karena kuota peserta yang tidak cukup. Selain kegiatan tersebut, terdapat sisa dana dari belanja langsung dan belanja tidak langsung yang tidak dapat dipakai.

❖ **Solusi :**

- 1) Pendapatan, melakukan langkah-langkah strategis untuk mencari sumber-sumber retribusi bagi peningkatan penerimaan dari sektor perhubungan.
- 2) Perlu alokasi anggaran yang memadai serta sarana dan prasarana bagi seluruh UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan sehingga dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan meningkatkan PAD.
- 3) Belanja, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran agar sesuai waktu yang direncanakan, termasuk percepatan penyelesaian administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

SASARAN 3

Dokumen perencanaan bidang perhubungan yang berkualitas.

Sasaran ini diharapkan agar perencanaan pembangunan sektor perhubungan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan berdasarkan data dan informasi yang akurat, terkini dan dapat dipertanggungjawabkan yang berguna untuk pengambilan kebijakan, perumusan program dan kegiatan sektor perhubungan (darat, laut dan udara) sehingga tepat sasaran dan lokasi serta bermanfaat untuk aksesibilitas, mobilitas orang dan barang, pengembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM.31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Tahapannya Pra Design, Design, Kontruksi). Data menyangkut ketersediaan dan kebutuhan sarana/prasarana dan fasilitas perhubungan yang tersebar di Kabupaten/Kota se-NTT. Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah kegiatan : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan kegiatan : Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan, dan sub kegiatan : Inventarisasi Sarana Dan Prasarana Perhubungan, SID dan UKL UPL Pelabuhan Laut Oepoli, Master Plan dan DED Terminal Tipe B di 7 lokasi yang sudah diserahkan, Study APPIL, Identifikasi peran sector transportasi untuk mendukung pariwisata, study identifikasi terminal type b di 4 lokasi baru, penyusunan profil/dinas perhubungan dalam angka Tahun 2019 dan Updating Geodatabase Perhubungan se NTT dengan total anggaran sebesar Rp.3.635.554.930,-

Tabel 3.4

Dokumen perencanaan bidang perhubungan yang berkualitas.

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Target 2019	Capaian (%)	Target Renstra 2019
1.	Jumlah dokumen Perencanaan (FS,SID) pemb.sarana prasarana transportasi darat, laut dan udara yang disusun.	Dok	15 dok	3 Dok	3 Dok	100 %	3 Dok
2.	Tersedianya data sarana dan prasarana fasilitas perhubungan yang up to date (terkini)	Dok	15 Kab, 1 Dok, 10 buku	1 Dok	9 keg/9 Dok	100%	9 keg/9 Dok 1 Dok
3.	Tersedianya daftar usulan program / kegiatan pembangunan sarana / prasarana fasilitas perhubungan (darat, laut dan udara) Tahun 2021	Keg / Dok	1 Dok 10 buku	1 Dok	2 keg	100 %	2 keg
4.	Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan pembangunan sarana / prasarana perhubungan di Provinsi NTT	Dok	1 kali keg, 1 Dok,	1 Dok	9 keg/9 dok	100%	6 Dok
Total						100%	

Penjelasan dari pencapaian indikator capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan melalui dana APBD Provinsi NTT telah dilakukan SID Pembangunan Pelabuhan Laut Oepoli, UKL-UPL Pembangunan Pelabuhan Laut Oepol, Master Plan dan DED Terminal Tipe B di 7 lokasi yang sudah diserahkan.
2. Tersedianya data sarana dan prasarana fasilitas perhubungan, berupa Buku Profil Perhubungan/Perhubungan Dalam Angka Tahun 2019 dan Website Perhubungan (www.dishub.nttprov.go.id), 1 dokumen. Diharapkan dengan adanya *website* ini masyarakat dan dunia usaha dapat mengakses data dan informasi pembangunan sektor perhubungan di NTT serta berbagai peraturan di bidang perhubungan termasuk persyaratan perijinan (ijin trayek, rubah bentuk, trayek/lintasan, pembangunan pelabuhan dan lain sebagainya). Buku Profil Perhubungan/Perhubungan Dalam Angka Tahun 2019 merupakan *updating* profil perhubungan tahun 2019 (dalam bentuk data *time series* beserta analisisnya). Capaian indikator ini 100%. Apa yang direncanakan terlaksana semuanya.

Kinerja (hasil/keluaran) pelaksanaan pembangunan sarana/prasarana dan fasilitas perhubungan darat, laut dan udara tahun 2019 (sumber dana APBD dan APBN) adalah sebagai berikut :

1) Sarana & Prasarana Transportasi Darat (Lalu Lintas Angkutan Jalan)

Sumber Dana APBN :

- Subsidi Operasi Bus Perintis DAMRI stasiun Kupang, Kefamenanu, Ende dan Waingapu. Jumlah trayek/lintasan pelayanan perintis yaitu 33 (tiga puluh tiga). Trayek/lintasan terdiri dari : Stasiun Kupang 10 trayek/lintasan, Stasiun Kefamenanu 8 trayek/lintasan, Stasiun Ende 8 trayek/lintasan, dan Stasiun Waingapu 7 trayek/lintasan.

Tabel 3.5. Jumlah Stasiun DAMRI dan Trayek Keperintisan Tahun 2018

No	Stasiun DAMRI	Trayek
1.	Stasiun Kupang	10 trayek
2.	Stasiun Kefamenanu	8 trayek
3.	Stasiun Ende	8 trayek
4.	Stasiun Waingapu	7 trayek

Sumber : Hasil Olahan Dinas Perhubungan Provinsi NTT

2) Sarana & Prasarana Transportasi Darat (Lalu Lintas Angkutan Penyeberangan)

Saat ini Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah memiliki 13 (tiga belas) armada angkutan penyeberangan dan 2 unit yang beroperasi di lintasan sape – Labuan Bajo yaitu KMP Cakalang I dan KMP, Cakalang II. Untuk perusahaan pengelola kapal terdiri dari 3 unit Kapal Perintis Penyeberangan yang dikelola oleh BUMD : PT. Flobamor Kupang yaitu : KMP. Pulau Sabu, KMP. Ile Boleng dan KMP Sirung. Sedangkan milik PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Kupang, ada 8 (delapan) unit Kapal Motor penyeberangan, yaitu : KMP. Ile Mandiri, KMP. Namparnos, KMP. Ile Ape, KMP. Uma Kalada, KMP. Ranaka, KMP. Ine Rie II, KMP Ile Labalekan, KMP. Lakaan yang melayani wilayah/daerah antar Kabupaten/Kota di NTT. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia ada 63 Lintasan penyeberangan dalam Provinsi yang terdiri dari 10 lintasan komersil dan 53 lintasan perintis dimana ada 25 lintasan penyeberangan yang sudah dilayani dan 38 lintasan penyeberangan yang belum dialayani. 11 lintasan penyeberangan Antar Provinsi yang terdiri dari 2 lintasan komersil dan 9 lintasan perintis yang mana 7 lintasan penyeberangan belum dilayani dan 4 lintasan penyeberangan yang sudah dilayani. 15 lintasan penyeberangan pada tahun 2019 yaitu : Lintasan Larantuka Solor, Solor-Lewoleba, Adonara-Baranusa, Naikliu-Teluk Gurita, Adonara-Kewapante, Labuan Bajo-Waikelo, Palue Maropokot, Naikliu –Kalabahi, Kewapante-Marapokot, Baranusa-Lewoleba, Kalabahi-Lewoleba, Kupang-Waikelo, Raijua-Ende, Raijua-Waingapu, Bakalang-Naikliu.

3) Sarana & Prasarana Transportasi Laut

Pelaksanaan pembangunan sarana/prasarana perhubungan laut yang dilakukan pada Tahun 2019 ini, yaitu:

- Untuk menghubungkan wilayah/daerah tertinggal/terpencil dan daerah perbatasan di Nusa Tenggara Timur sudah dilayani dengan rute pelayanan angkutan Perintis Laut. Dalam kurun waktu 2013 – 2018 5 (lima) tahun, terjadi peningkatan pelayanan keperintisan laut melalui penambahan 11 (sebelas) armada Kapal Perintis serta penambahan lokasi pangkalan yaitu Pangkalan Kupang, Maumere dan Waingapu sehingga jarak tempuh dan lama hari suatu trayek/lintasan semakin pendek. Dimana sebelumnya lama hari perjalanannya hingga mencapai 21 (dua puluh satu) hari sekarang menjadi 12 (dua belas) hari bahkan ada yang 7 (tujuh) hari. Di Provinsi NTT saat ini memiliki 11 (sebelas) unit Kapal Angkutan Laut Perintis.

3. Terlaksananya rapat koordinasi teknis perhubungan se - NTT

- ❖ Tersedianya daftar usulan rencana program dan kegiatan pembangunan sektor perhubungan Tahun Anggaran 2021 (sumber dana APBD dan APBN).
- ❖ Tersedianya rekomendasi hasil pelaksanaan Rakornis Perhubungan Tahun 2019. Rakornis dilaksanakan 1 kali selama 3 hari di Kabupaten Nagekeo, yang diikuti oleh jajaran Perhubungan se-NTT di Kupang (Dinas Perhubungan Kab/Kota se NTT dan 5



UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara se-NTT (14 Bandara), Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP: 5 KSOP), Kantor Unit Penyelenggara (KUPP : 9 KUPP), PT. Peln, ASDP, PD. Flobamor, Distrik Navigasi, Pelindo, BMKG, SAR, BPTD Wilayah XIII, Angkasa Pura, DPD Organda, DPC

Organda se NTT dan DPC Pelayanan Rakyat. Capaian kegiatan ini 100%.

4. Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan pembangunan sarana / prasarana perhubungan di Provinsi NTT.

Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan terpadu adalah rekapan seluruh laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sarana/prasarana perhubungan

(penyeberangan, laut, udara), untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan. Capaian kegiatan ini adalah 100 %.

Dengan demikian rata-rata capaian kinerja sasaran Terwujudnya perencanaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas adalah 100% atau dalam kategori sangat berhasil.

❖ **Permasalahan :**

Anggaran APBD Provinsi NTT belum mampu untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana fasilitas perhubungan, sehingga ketergantungan dengan dana APBN Kementerian Perhubungan sangat tinggi. APBD Provinsi NTT hanya mampu untuk menyediakan berbagai dokumen perencanaan sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan pembangunan fisik sebuah bandara, pelabuhan, terminal, dan fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan. Itupun alokasi anggaran APBD yang ada selama belum memadai untuk merealisasikan semua penyusunan dokumen perencanaan (Pra Studi Kelayakan, Study Kelayakan, Master Plan, SID, AMDAL, DED Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan Darat, Laut dan Udara).

❖ **Solusi :**

Menyediakan anggaran yang memadai untuk penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan (Pra Studi Kelayakan, Study Kelayakan, Master Plan, SID, AMDAL, DED Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan Darat, Laut dan Udara).

SASARAN 4

Meningkatnya mutu dan jumlah sarana prasarana serta kualitas database bidang perhubungan

Sasaran ini diharapkan mampu mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas transportasi yang memadai. Program/kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan.

Tabel 3.6

Meningkatnya mutu dan jumlah sarana prasarana serta kualitas database bidang perhubungan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Target 2019	Capaian Tahun 2019	Target Renstra 2019
1.	Jumlah terminal tipe B yang baik	%	-	100% (1 terminal)	10%	100%	10 %
2.	Jumlah trayek angkutan jalan dan penyeberangan yang dilayani	unit			Jalan : 3, penyeb : 1	Jalan : 3, Penyebe : 1	Jalan : 3, penyeb : 1
3.	Persentase Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pelabuhan	%			60%	30%	60%
4.	Jumlah terminal tipe B yang melaksanakan ramp check dengan baik	unit	-	2 terminal	5 terminal	2 terminal (40%)	5 terminal
	Total					67.5%	

Penjelasan dari pencapaian indikator capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Jumlah terminal tipe b yang baik ditargetkan setiap tahun meningkat 10%, sesuai dengan target pada Renstra Dinas Perhubungan Provinsi NTT. Pada tahun 2018, dilakukan rehabilitasi pada terminal Oebobo, sehingga capaiannya 100%. Pada tahun 2019 untuk mencapai target indikator kinerja jumlah terminal tipe b yang baik, maka Dinas Perhubungan melakukan study Master Plan dan DED Terminal tipe B pada 7 lokasi terminal yang sudah diserahkan. pencapaiannya adalah 100%.



Terminal Oebobo

Terminal Noelbaki

Terminal Nggorang

2. Jumlah trayek angkutan jalan dan penyeberangan yang dilayani ditargetkan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 3 trayek untuk angkutan jalan dan 1 trayek untuk angkutan penyeberangan.
3. Persentase Peningkatan kualitas pelayanan pelabuhan, ditargetkan pada tahun 2019 mencapai 60% baik untuk pelabuhan laut maupun penyeberangan, dan realisasi yang dapat dicapai pada tahun 2019 adalah 30%, dikarenakan keterbatasan dana APBD.
4. Jumlah terminal tipe B yang melaksanakan ramp check dengan baik ditargetkan dilaksanakan di 5 terminal, namun realisasinya hanya di 2 terminal yaitu terminal Oebobo dan terminal Noelbaki.

Dengan demikian capaian sasaran mutu dan jumlah sarana prasarana serta kualitas database bidang perhubungan adalah 67.5% dan dikategorikan cukup berhasil.

❖ **Masalah :**

Keterbatasan dana khususnya sumber dana APBD untuk membiayai pembangunan fisik sarana prasarana dan fasilitas perhubungan (darat, laut) sehingga selama ini, pemerintah daerah bergantung kepada sumber dana APBN Kementerian Perhubungan.

❖ **Solusi :**

Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat (Kemenehub) agar memberikan dukungan dana untuk pembangunan dan pengembangan sarpras perhubungan di NTT. Disamping itu, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembebasan lahan, penyusunan dokumen perencanaan yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyiapkan itu.

SASARAN 5

Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi

Sasaran ini bertujuan meningkatkan keselamatan dan keamanan lalu lintas angkutan jalan, serta menurunnya angka kejadian kecelakaan dan korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas.

Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan kegiatan : Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan, dengan sub kegiatannya Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan dengan didukung anggaran sebesar Rp. 844.719.500,-

Tabel. 3.7

Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Renstra 2019
1.	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan di ruas jalan provinsi	%	-	RPPJ : 24 unit	-	-	80%
			-	Marka 2.67%	-	-	
			Guard rail : 2.416 m/ 100%	Guard rail 3208 M/ 21.51 %	Guard rail : 237 M	76.58%	
2.	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan ke Tourism Estate	%			RPPJ : 15 unit	100%	15%
	Total					88.29	

Penjelasan dari pencapaian indikator capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Indikator jumlah sarana prasarana fasilitas keselamatan lalu lintas meningkat dengan rincian sebagai berikut :

a. Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan di ruas jalan provinsi :

- RPPJ yang di pasang pada tahun 2018 adalah sebanyak 24 unit.
- Marka jalan; target pengecatan marka jalan di ruas jalan Provinsi sampai dengan akhir tahun perencanaan (Tahun 2018) adalah sepanjang 1.019.585 M. Pada Tahun 2016 realisasi pengecatan marka jalan baru mencapai 25.626 M (2,67%). Selisih marka jalan yang belum terealisasi seharusnya dilaksanakan pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 serta 2019, namun karena adanya rasionalisasi anggaran Dinas Perhubungan Provinsi NTT maka pengecatan marka jalan tersebut tidak bisa dilaksanakan.
- Pagar pengaman jalan (guardrail); target pagar pengaman jalan yang terpasang pada ruas jalan Provinsi sampai dengan akhir tahun perencanaan (Tahun 2018) adalah sebanyak 14.917 M, realisasi sampai dengan Desember 2018 sebanyak 3.208 M (21,51%). Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran pada Dinas Perhubungan Provinsi sehingga jumlah pagar pengaman jalan yang di pasang disesuaikan dengan kondisi keuangan. Pada tahun 2019 dikerjakan lagi sepanjang 237 M, sehingga masih tersisa 11.472 M yang belum dikerjakan, dan realisasinya adalah 23.09%. Terhadap target 2019 dalam RPJMD sebesar 80%, maka pada faskes guardrail hanya mengalami kenaikan sebesar 1.58% sesuai anggaran dalam DPA sehingga capaiannya adalah 76,58%



Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalalan di ruas jalan Provinsi di Kabupaten Ngada di ruas jalan Bajawa – Poma.

- b. Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan ke Tourism Estate, ditargetkan pada tahun 2019 sebesar 15%. Pada tahun 2019, untuk memenuhi indikator kinerja Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan ke Tourism Estate, maka di pasang RPPJ di Kabupaten Kupang, ruas jalan Hansisi – Tj. Mealao sebanyak 15 unit. RPPJ tersebut menunjukkan arah ke Pantai Liman.



Jadi rata-rata pencapaian untuk indikator jumlah fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi sampai dengan Desember adalah 88.29% atau dikategorikan sangat berhasil.

Tabel 3.8. Perkembangan Jumlah Fasilitas Keselamatan (Ruas Jalan Provinsi)abupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2015 s/d 2019

No	Fasilitas Keselamatan	Total					
		2015	2016	2017	2018	2019	Total
1	Rambu Lalulintas (Buah)	406	624	-	-	-	1.030
2	Guardrail (Meter)	380	792	476	792	237	2.677
3	Marka (Meter)	2.250	13.010	-			15.260
4	RPPJ (Buah)	-	2	-	24	16	42

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sektor Perhubungan merupakan salah satu sektor sumber Pendapatan Asli Daerah, melalui beberapa obyek retribusi yaitu : Retribusi Jasa Umum (Pengujian Kendaraan Bermotor), Retribusi Jasa Usaha (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah : sewa rumah dinas 2 unit, Retribusi Terminal Tipe B, Sewa Kios/Warung, Retribusi Jasa Verifikasi Andalalin), dan Retribusi Perijinan Tertentu (Retribusi Izin Trayek AKDP). Dasar hukum pelaksanaan yaitu Perda Provinsi NTT Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Trayek, Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Pergub Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Ijin Trayek, Retribusi Jasa Umum Dan Retribusi Jasa Usaha.

Berdasarkan ketiga Perda ini, Dinas Perhubungan Provinsi NTT diberikan target PAD, yang mana dalam penetapannya memperhatikan obyek dan potensi yang ada pada masing-masing UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan (5 UPT) dan SKPD Dinas Perhubungan Provinsi NTT. Target PAD Tahun Anggaran 2019 untuk sektor perhubungan sebesar : Rp. 848.400.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar : Rp. 696.111.000,- (82,05%). Realisasi Desember hanya mencapai 82,05% disebabkan karena UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan yang tidak bisa melakukan uji mutu kendaraan karena di UPT Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan belum memiliki SDM yang memiliki kualifikasi sebagai penguji kendaraan bermotor, keterbatasan personil pengelola terminal, selain itu ada salah satu ijin yang di hapus yaitu ijin insidentil sehingga sehingga berpengaruh pada penerimaan.

Total anggaran Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 27.307.152.685,- dengan realisasi sebesar Rp. 25.875.190.661,- (94,76%) sisa dana sebesar Rp. 1.431.962.024,- (5,24%), yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan Pegawai, Tambahan Penghasilan dan Insentif Pemungutan Retribusi) sebesar Rp. 12.764.635.785,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.046.963.465,- (94,38%) dan sisa dana sebesar Rp. 717.672.320,- (5,62%). Belanja Langsung sebesar Rp. 14.542.516.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.828.227.196,- (95,09%) dan sisa dana sebesar Rp. 714.289.704,- (4,91%). Realisasi belanja hanya mencapai 94,76% karena tidak terealisasinya anggaran untuk Diklat Andalalin disebabkan oleh tidak tercapainya kuota untuk peserta diklat. Selain 2 kegiatan tersebut, ada sisa dana dari belanja langsung dan belanja tidak langsung yang tidak dapat dipakai.

Alokasi Anggaran untuk SKPD Dinas Perhubungan Provinsi NTT (sumber dana APBD) dalam 2 tahun terakhir ini cenderung mengalami penurunan.

Sumber dana yang mendukung pembiayaan kegiatan – kegiatan pada Dinas Perhubungan dalam Tahun Anggaran 2019 bersumber dari APBD I (DAU), terdiri dari :

Belanja Langsung

Jumlah Belanja Langsung (Rutin dan Urusan Wajib) sebesar Rp 14.542.516.900. Belanja Langsung terdiri dari :

- 1) Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.352.940.000,-
- 2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 8.979.270.650,-
- 3) Belanja Modal, sebesar Rp. 948.169.521,-

Tabel 3.9. Rincian Realisasi Program/Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2019

Kode	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Dana			Sisa Dana (RP)
			Rp.	% Keu	% Fisik	
	TOTAL BELANJA	24.045.015.956	23.132.443.954	96,20%	96,20%	1.431.962.024
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.764.635.785	12.046.963.465	94,38%	94,38%	717.672.320
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan Pegawai	9.306.761.785	8.610.140.775	92,51%	92,51%	696.621.010
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS (Kesra)	3.432.422.000	3.419.536.750	99,62%	99,62%	12.885.250
5.1.1.03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	25.452.000	17.285.940	67,92%	67,92%	8.166.060
5.2	BELANJA LANGSUNG	11.280.380.171	11.085.480.489	98,27%	98,27%	194.899.682
07.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.950.469.620	1.917.746.923	98,32%	98,32%	32.722.697
01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000	30.000.000	100,00%	100,00%	0
01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	298.807.900	282.774.483	94,63%	94,63%	16.033.417

01.04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	19.100.000	17600000	92,15%	92,15%	1.500.000
01.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	42.725.000	42.725.000	100,00%	100,00%	0
01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	575.705.000	562.693.000	97,74%	97,74%	13.012.000
01.08	Penyediaan Jasa dan Bahan Kebersihan Kantor	189.560.000	189.560.000	100,00%	100,00%	0
01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	83.097.000	83.097.000	100,00%	100,00%	0
01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.487.600	41.487.600	100,00%	100,00%	0
01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	20.100.000	20.100.000	100,00%	100,00%	0
01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	20.000.000	100,00%	100,00%	0
01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	51.390.000	51.390.000	100,00%	100,00%	0
01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	70.000.000	70.000.000	100,00%	100,00%	0
01.19	Penyediaan Jasa Pengangkutan Beras dan Barang Dinas	12.500.000	12.500.000	100,00%	100,00%	0
01.21	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dalam Daerah	125.000.000	125.000.000	100,00%	100,00%	0
01.31	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	326.000.000	326.000.000	100,00%	100,00%	0

01.49	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	44.997.120	42.819.840	95,16%	95,16%	2.177.280
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	309.966.250	306.631.750	98,92%	98,92%	3.334.500
02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	10.800.000	10.800.000	100,00%	100,00%	0
02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	76.666.250	76.666.250	100,00%	100,00%	0
02.10	Pengadaan Mebeleur	19.600.000	16.800.000	85,71%	85,71%	2.800.000
02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	92.100.000	91.730.000	99,60%	99,60%	370.000
02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	70.650.000	70.617.500	99,95%	99,95%	32.500
02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	26.500.000	26.460.000	99,85%	99,85%	40.000
02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	13.650.000	13.558.000	99,33%	99,33%	92.000
06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	15.284.000	15.284.000	100%	100%	0
06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.284.000	15.284.000	100,00%	100,00%	0
29	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA FASILITAS PERHUBUNGAN	9.004.660.301	8.845.817.816	98,24%	98,24%	158.842.485

29.01	Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan	4.478.808.101	4.478.666.000	100,00%	100,00%	142.101
29.02	Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pengawasan Bidang Perhubungan	1.413.195.000	1.411.406.000	99,87%	99,87%	1.789.000
29.03	Peningkatan Kapasitas Aparatur Perhubungan	457.164.000	300.823.400	65,80%	65,80%	156.340.600
29.04	Peningkatan Koordinasi Teknis Perhubungan se Provinsi NTT	262.943.000	262.943.000	100,00%	100,00%	0
29.05	Peningkatan Mutu Pelayanan Operator dan Modal Angkutan	574.966.000	574.521.216	99,92%	99,92%	444.784
29.06	Manajemen Lalu Lintas Angkutan Penumpang, Barang dan Jasa	990.451.400	990.451.400	100,00%	100,00%	0
29.07	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Berlalu Lintas	383.637.000	383.511.000	99,97%	99,97%	126.000
29.08	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	443.495.800	443.495.800	100,00%	100,00%	0
17.03	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Berlalu Lintas	655.397.700	611.940.880	93,37%	93,37%	43.456.820
17.04	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terpadu	538.395.500	533.803.900	99,15%	99,15%	4.591.600

C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Belanja Tidak Langsung : Sisa lebih gaji Pesiunan dan dana cadangan gaji

Belanja Langsung :

Efisiensi pembelanjaan serta tidak terpakainya dana Diklat Teknis Aparatur karena tidak terlaksananya Diklat oleh penyelenggara karena peserta yang tidak memenuhi kuota.

D. SOLUSI

1. Melakukan koordinasi lebih awal dengan BPSDM Kemeterian Perhubungan diklat, sehingga dana yang dianggarkan dapat terealisasi dengan tepat.
2. Memaksimalkan anggaran yang ada (APBD) dan mengusulkan anggaran kepada APBD Provinsi dan APBN, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan rutin sesuai dengan arahan Renstra dan RPJMD Provinsi NTT.

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan itu, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap unit eselon II diwajibkan membuat Laporan Kinerja dan Keuangan yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan rencana strategik dan perjanjian kinerja yang telah dibuat selama satu tahun.

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Provinsi NTT dan 5 UPT Perijinan & Pengawasan LLAJ Tahun Anggaran 2019, nilai akhir capaian Kinerja Dinas dan 5 (lima) UPT Pegelola Prasarana Teknis Perhubungan adalah 96.21 % dari target satu tahun 100 %. Hasil tersebut merupakan penyelenggaraan atas 5 (lima) sasaran utama yang dilakukan pengukuran kinerja sesuai indikator-indikator kinerja yang ada yang dicapai dalam Tahun Anggaran 2019 melalui intervensi program dan kegiatan serta dukungan anggaran baik melalui sumber dana APBD Provinsi Tahun Anggaran 2019. Sasaran yang sudah ditetapkan dalam perencanaan strategik dan perjanjian kinerja secara bertahap terus diupayakan melalui kebijakan, program dan kegiatan dalam rencana kerja (Renja) tahunan guna mewujudkan Visi dan Misi serta Tujuan Pembangunan Sektor Perhubungan pada masa yang akan datang. Rata-rata capaian dari 5 (lima) sasaran strategis dan indikator kinerja yang sudah ditetapkan tersebut adalah sebesar 83.16% dan dikategorikan berhasil.

Terdapat beberapa indikator kinerja yang pencapaiannya belum 100% akan menjadi perhatian SKPD Dinas Perhubungan Provinsi NTT pada tahun anggaran berikutnya sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai terutama bagi terwujudnya peningkatan pelayanan jasa transportasi darat, laut dan udara yang terpadu, selamat, aman dan lancar.

B. S A R A N

Untuk sinergitas dan harmonisasi penetapan indikator-indikator kinerja dan formula perhitungannya antara berbagai dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, Renja) dengan Indikator Kinerja Utama, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Penilaian Laporan Kinerja, perlu adanya koordinasi dan kerjasama antar SKPD tersebut sejak proses penyusunan sampai pada penetapannya sehingga terjadi korelasi dan keterkaitan antara berbagai dokumen yang ada untuk menghindari adanya penyesuaian - penyesuaian kembali dokumen karena perbedaan interpretasi / pandangan, pemahaman dan penilaian terhadap suatu sasaran dan indikator kinerja yang ada.

Dalam rangka peningkatan kualitas penyajian dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) perlu dilakukan pelatihan dan workshop baik kepada pejabat yang langsung menangani penyusunan Laporan Kinerja ini maupun kepada staf dan aparatur lingkup Pemerintah Provinsi NTT sehingga diperoleh pemahaman dan pengetahuan bersama terhadap indikator-indikator kinerja serta analisis data dan informasi yang ada termasuk dalam aspek penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang ada.

Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat berguna bagi pengambil kebijakan, aparatur pada unit kerja masing-masing untuk meningkatkan kualitas dan hasil kerja dalam perumusan program, kegiatan dan penganggaran pada sektor perhubungan pada masa yang akan datang sebagai sektor yang berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, membangun konektivitas antar daerah dan wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, Januari 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, ✓

ISYAK NUKA, ST, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631112 199803 1 004